

Bird's Head Seascape News

Media Informasi dan Komunikasi Antar Mitra Konservasi Bentang Laut Kepala Burung

Edisi 03 / April - Juni 2015

**Pertemuan Pendanaan Berkelanjutan
Konservasi Bentang Laut Kepala Burung**

**Jejaring Konservasi BLKB Gelar
Pelatihan Penulisan Publikasi Ilmiah**

**Menteri Susi Pudjiastuti Serahkan
Penghargaan Spesies Ikan Baru**

Teman-teman Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) yang kami hormati, merupakan kehormatan bagi saya untuk mengantarkan Bird's Head Seascape News yang ketiga ini. Semoga semua informasi yang ada di dalam media ini berguna untuk kita bersama.

Pada edisi ketiga ini Anda bisa membaca kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mitra konservasi di BLKB diantaranya adalah pertemuan pembahasan pendanaan berkelanjutan konservasi BLKB, penghargaan dan penyerahan spesies ikan baru *Cirrhitilabrus marinda* kepada Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, pelatihan penulisan publikasi ilmiah, upaya perlindungan dan pelestarian penyu, serta cerita-cerita menarik lainnya.

Praktik-praktik yang baik harus terus disebar, salah satunya adalah melalui penerbitan newsletter ini, karena hakikatnya upaya menjaga kelestarian alam adalah tanggung jawab seluruh individu di muka bumi tanpa kecuali.

Terima kasih untuk semua yang telah memberikan masukan, informasi, foto dan sebagainya sampai terbitnya edisi ketiga newsletter BLKB ini. Semoga terus berkelanjutan semua karya kita untuk masyarakat luas.

Selamat membaca,

Henny Widayanti
Manajer Sekretariat Bersama BLKB

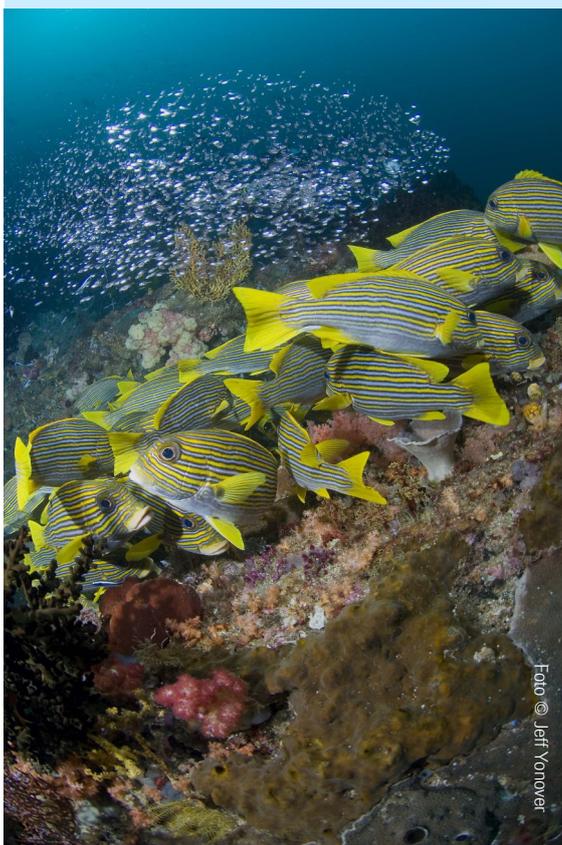


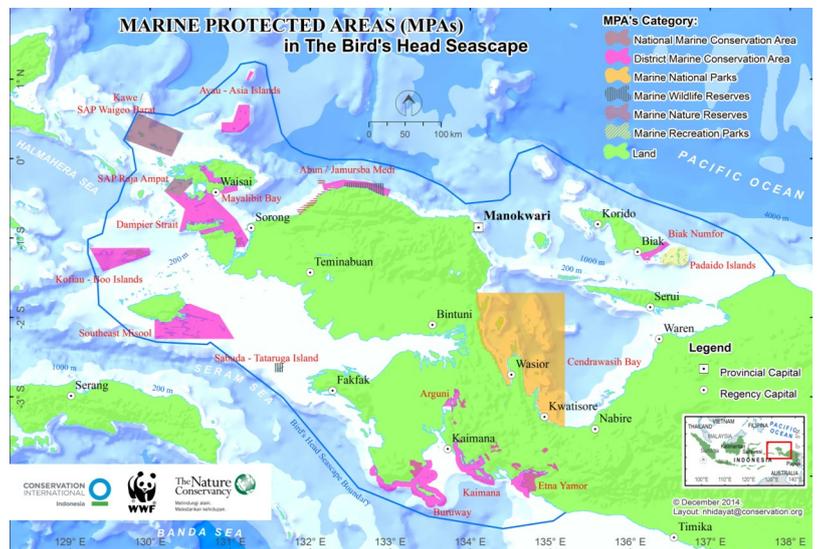
Foto © Jeff Yonover

Sekilas Inisiatif BLKB

Inisiatif Bird's Head Seascape atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) dimulai pada tahun 2005 untuk mencari keseimbangan antara melindungi sumberdaya alam yang kaya dan memastikan rakyat tetap mendapatkan manfaat dari sumberdaya yang ada. Sebuah kemitraan yang kuat, yang didukung dana terbesar dari Walton Family Foundation untuk mencapai sukses dan belum pernah terjadi sebelumnya antara tiga LSM internasional yaitu Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), dan WWF (World Wildlife Fund) Indonesia dengan pemerintah lokal, provinsi dan nasional, masyarakat pesisir, universitas, dan organisasi lokal menyediakan sebuah landasan dimana pembangunan berkelanjutan dapat dicapai.

Pusat dari inisiatif yang ambisius ini adalah pembentukan dan implementasi dari jejaring multi pemanfaatan yang secara ekologis terhubung dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang tangguh, didukung dan terintegrasi dalam peraturan lokal dan nasional, serta dikelola bersama oleh instansi pemerintah dan masyarakat lokal. KKP yang dideklarasikan secara lokal ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengelola KKP-nya sendiri, dan memperkuat hak ulayat darat dan laut. Pengelolaan dan rencana zonasi memasukkan teori pengelolaan perikanan yang maju sekaligus juga menghidupkan kembali sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional Papua, seperti tradisi 'sasi' dan mendorong mereka untuk menjaga kebudayaan lokalnya.

Upaya-upaya tim BLKB dan mitra kami diarahkan menuju penguatan implementasi secara langsung di Bentang Laut dan mendukung kebijakan lintas sektoral, tata pemerintahan, pendidikan, pemantauan, dan inisiatif pembiayaan untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan dari BLKB.***



Upaya-upaya tim BLKB dan mitra kami diarahkan menuju penguatan implementasi secara langsung di Bentang Laut dan mendukung kebijakan lintas sektoral, tata pemerintahan, pendidikan, pemantauan, dan inisiatif pembiayaan untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan dari BLKB.

PENDANAAN KONSERVASI BERKELANJUTAN

Sebuah Langkah untuk Kelestarian BLKB

Sebagai lanjutan dari pertemuan pendanaan berkelanjutan BLKB di bulan Maret, pada tanggal 27-28 April 2015, bertempat di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Sekretariat Bersama BLKB dan Tim Penasehat Persiapan Pendanaan Berkelanjutan BLKB menggelar pertemuan rutin bulanan untuk menjawab salah satu pekerjaan rumah “pendanaan yang berkelanjutan bagi pengelolaan konservasi di wilayah Bentang Laut Kepala Burung”. Tim Penasehat Persiapan Pendanaan Berkelanjutan BLKB ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur Papua Barat No. 660/58/2/2015.

Tujuan pertemuan adalah untuk membahas langkah-langkah yang pasti dalam pembentukan *trust fund* (dana perwalian). Pertemuan juga bertujuan mendengar masukan dari pengalaman KEHATI dalam pengelolaan dana perwalian, bagaimana mekanismenya, bagaimana strukturnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembentukan dana perwalian, termasuk pembentukan yayasan.

Pada pertemuan yang digelar selama dua hari ini menghasilkan beberapa keputusan penting diantaranya adalah: 1) Perlunya dibentuk sumber pendanaan yang lestari untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sumber daya alam laut yang berkelanjutan di Papua, 2) Sumber pendanaan ini merupakan pelengkap bagi Pendanaan yang bersumber dari Anggaran pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, 3) Pengelolaan kawasan konservasi laut di Papua harus dan akan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Selain beberapa hal diatas, pada pertemuan tersebut juga meyakinkan bahwa nantinya lembaga akan berbentuk Yayasan.

“Saat ini kita sedang menciptakan sejarah dimana Indonesia ikut menyelamatkan dunia dan kita sudah tidak bisa lagi mundur ke belakang. Langkah besar dimulai dengan langkah kecil. Melalui lembaga ini kita bersatu untuk menjaga titipan anak cucu,” kata Ketua Tim Penasehat Persiapan Pendanaan Berkelanjutan BLKB, Bapak. Freddy Numberi tentang harapan terhadap lembaga ini ke depan.

Kemudian pada tanggal 26 Juni 2015, pertemuan lanjutan kembali digelar di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta. Pada pertemuan ini, arahnya sudah mengerucut pada pembahasan pembentukan yayasan, menentukan struktur kepengurusan yayasan berikut mekanisme pelaksanaan kegiatan harian, serta pembahasan aspek legalitas yayasan tersebut. “Yayasan ini nantinya dapat berfungsi sebagai lembaga yang akan menjadi mitra pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) dalam melestarikan sumber daya alam di wilayah ini. Oleh karena itu, saya mohon hal tersebut dapat tercermin dalam visi, misi, dan tujuan pendirian yayasan,” pesan Bapak. Freddy Numberi kepada seluruh peserta pertemuan.

Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya terpilih nama-nama calon pengurus yayasan. Setelah nama-nama tersebut disepakati bersama, nantinya aspek legalitas pendirian yayasan akan dilengkapi dan disahkan melalui notaris. yayasan ini ditargetkan sudah bisa disahkan oleh notaris pada bulan Agustus 2015, dan kemudian siap untuk diluncurkan.***

(Teks: Nugroho Arif Prabowo/TNC)



(Foto: Theri Andika/Conservation International)

”

Pertemuan ini diadakan untuk menjawab salah satu pekerjaan rumah dalam pengelolaan wilayah konservasi yaitu pendanaan yang berkelanjutan untuk pengelolaan konservasi pada wilayah Bentang Laut Kepala Burung

Sosialisasi Lembaga Sertifikasi Profesi di UNIPA

Sosialisasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Jum'at, 29 Mei 2015 di Ruang Rapat PR IV dan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNIPA, Conservation International (CI) dan Universitas Negeri Papua (UNIPA) menggelar sosialisasi LSP yang diawali dengan pertemuan antara CI dengan Pembantu Rektor IV UNIPA.

Dr. Victor Nikijuluw, Director Marine Conservation International Indonesia menjelaskan tentang apa dan bagaimana LSP, serta betapa pentingnya LSP didirikan di UNIPA. Pembantu Rektor IV menyambut positif ide pembentukan LSP di UNIPA, dan beliau mengatakan bahwa akan membahasnya pada level pimpinan yang lebih tinggi di UNIPA. Kegiatan sosialisasi LSP kemudian dilanjutkan di Ruang Rapat Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan UNIPA. Memberikan masukan kepada UNIPA agar UNIPA dapat mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi.

Bapak Victor Nikijuluw kemudian mempresentasikan materi tentang "Kemungkinan Mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bahari di UNIPA - Manokwari", yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Pentingnya LSP - Pariwisata Bahari didirikan di UNIPA dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa di Kabupaten Raja Ampat terdapat kurang lebih 109 karyawan di BLUD UPTD KKP Raja Ampat yang sudah mendapatkan pelatihan ketrampilan pada bidang wisata bahari (seperti menyelam, teknisi mesin kapal, *room services*) namun mereka belum disertifikasi.

Sertifikasi ini diperlukan agar mereka memperoleh penghargaan sesuai dengan tingkat keahliannya masing-masing, dan agar mereka diakui dan dapat diterima oleh para pemakai jasa, terutama yang berasal dari luar negeri.

Setelah melewati sesi tanya jawab, para peserta pertemuan setuju agar di UNIPA didirikan Lembaga Sertifikasi Profesi. Bapak Victor menyampaikan bahwa Pembentukan LSP di UNIPA tidak rumit, yaitu dapat dilakukan dengan SK Rektor, namun mendapatkan akreditasi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).***

(Henny Widayanti/Conservation International)



Sosialisasi Lembaga Sertifikasi Profesi (29/5) di UNIPA.
(Foto: Theri Andika/Conservation International)

Jejaring Konservasi BLKB Gelar Pelatihan Penulisan Publikasi Ilmiah

Tim monitoring dan science jejaring konservasi Bentang Laut Kepala Burung yang terdiri dari The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI), World Wildlife Fund (WWF) dan Universitas Negeri Papua (UNIPA), menggelar kegiatan peningkatan kapasitas di bidang penulisan publikasi ilmiah. Kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Negeri Papua, Manokwari pada (8-11/6) ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari anggota tim monitoring untuk menghasilkan dan menulis riset ilmiah.

"Kegiatan ini akan dilaksanakan secara seri selama dua tahun ke depan dengan tema yang berbeda di setiap seri pelatihannya. Pada akhirnya diharapkan masing-masing dari anggota tim monitoring bisa menghasilkan publikasi ilmiah berskala internasional," kata Purwanto, Conservation Science Specialist The Nature Conservancy. Purwanto menambahkan, untuk tema pelatihan kali ini adalah tentang mendesain pertanyaan kunci serta mendapatkan literatur untuk mendukung sebuah penelitian ilmiah.

Di wilayah Bentang Laut Kepala Burung yang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut banyak terdapat spesies laut yang penting dan terancam punah, termasuk penyu dan *cetacea*. Banyak pembelajaran yang bisa diangkat dari kawasan ini yang diharapkan bisa mendukung kebijakan lintas sektoral, tata pemerintahan, juga pendidikan sehingga manfaat dari konservasi bisa dirasakan oleh masyarakat.***
(Nugroho Arif Prabowo/TNC)



Peserta pelatihan penulisan publikasi ilmiah berfoto bersama setelah usai kegiatan.
(Foto: Awaludinnoer/TNC)



Kegiatan ini akan dilaksanakan secara seri selama dua tahun ke depan dengan tema yang berbeda di setiap seri pelatihannya. Pada akhirnya diharapkan masing-masing dari anggota tim monitoring bisa menghasilkan publikasi ilmiah berskala internasional

Pelatihan Penulisan Lingkungan Hidup bagi Jurnalis

Dalam rangka memperingati *Coral Triangle Day* atau Hari Segitiga Terumbu Karang, pada (10/6) The Nature Conservancy (TNC) menggelar kegiatan pelatihan penulisan lingkungan bagi para jurnalis di Sorong. Kegiatan tersebut diadakan di Kantor TNC di Kota Sorong.

“Tujuan dari kegiatan ini selain sebagai bagian dari peringatan *Coral Triangle Day*, juga sebagai sarana untuk berbagi bersama dengan teman-teman jurnalis terkait penulisan berita lingkungan. Sehingga nantinya tulisan tentang lingkungan bisa lebih disukai oleh masyarakat,” papar Lukas Rumetna, Papua Bird’s Head Portfolio Manager The Nature Conservancy.

Pada kegiatan tersebut, para jurnalis yang hadir selain mengkaji tulisan-tulisan tentang lingkungan juga saling berbagi pengalaman tentang peliputan isu-isu lingkungan yang selama ini mereka lakukan. Agar penulisan berita tentang lingkungan menjadi lebih menarik banyak hal harus diperhatikan.

Selain bobot peristiwa itu sendiri, juga harus diperhatikan pemilihan tema serta pemilihan sudut pandang penulisan. Bahwa pemberitaan lingkungan hendaknya juga bisa menginspirasi para pembaca untuk menjaga dan berbuat lebih baik lagi bagi lingkungan di sekitarnya, sehingga senantiasa lestari.***

(Teks dan foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)



Menteri Susi Pudjiastuti Resmikan Kantor BLUD UPTD KKP Raja Ampat



Tepat di hari ulang tahun Kabupaten Raja Ampat ke-12 yang jatuh pada tanggal 9 Mei 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti meresmikan Kantor BLUD UPTD KKP Raja Ampat. Selain meninjau kelengkapan fasilitas kantor BLUD UPTD KKP Raja Ampat, pada kesempatan itu Ibu Susi juga membeli Kartu Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

(Teks dan Foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)

PENYULUHAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA KONSERVASI

Universitas Papua (UNIPA) melakukan kegiatan penyuluhan mengenai Pengenalan Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*) dan Upaya Konservasinya. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah lanjut dari upaya konservasi yang telah dilakukan di Pantai Jamursba Medi, Kabupaten Tambrauw yang merupakan pantai peneluran penyu belimbing terbesar di pasifik. Penyu belimbing adalah salah satu jenis hewan yang dilindungi. Status konservasi secara internasional menempatkan penyu belimbing dalam CITES APPENDIX I (mencakup jenis yang terancam punah, dimana perdagangan jenis tersebut hanya diizinkan dalam kondisi khusus). Sedangkan secara nasional dilindungi berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 (tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) dan UU No 7 Tahun 1999 (tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa). Kegiatan konservasi penyu belimbing membutuhkan upaya yang komprehensif. Perlindungan harus dilakukan terhadap habitat perkawinan dan pantai peneluran.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan pada Januari – Maret 2015 melibatkan masyarakat pada 12 kampung di daerah pesisir Manokwari yaitu Kampung Sairo, Bremi, Meinyunfoka, Sibuni, Singgameba, Yonggam, Mubri, Inya, Warbefor, Meyes, Mubraidiba, dan Dembek. Kegiatan penyuluhan oleh Tim UNIPA (Dr. Richardo Tapilatu, Dr. Fitriyanti Pakiding, dan Marjan Bato, M.Si) mencakup penyampaian informasi biologi dan ekologi dari penyu, upaya-upaya konservasi yang telah dilakukan, dan bahaya mengkonsumsi daging dan telur penyu. Selain itu terdapat diskusi terbuka bersama masyarakat di setiap kampung untuk mengetahui pemanfaatan penyu dan mengidentifikasi jenis penyu yang berada di pantai dekat pemukiman kampung, dasar identifikasi dengan memperlihatkan gambar penyu.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat mengambil daging dan telur semua jenis penyu (penyu hijau, penyu sisik, penyu sisik semu/lekan dan penyu belimbing) yang naik ke pantai. Daging dan telur penyu tersebut biasanya dijual ke pasar atau dikonsumsi oleh keluarga. Pengambilan daging dan telur yang dilakukan oleh masyarakat masih secara berlebihan. Masyarakat mengambil sebagian besar bahkan semua individu penyu dari semua jenis yang naik ke pantai untuk bertelur. Masyarakat meyakini terdapat khasiat dalam daging dan telur penyu. Padahal keyakinan tersebut tidak sesuai dengan fakta bahwa penyu berada di tingkat atas rantai makanan sehingga zat pencemar di dalam makanannya terakumulasi di dalam tubuhnya. Kandungan ini terbukti memberikan dampak berupa gangguan syaraf, penyakit ginjal, kanker hati serta berpengaruh pada janin dan anak (Ventura, et al, 2015). Kegiatan Penyuluhan mendapat tanggapan positif. Masyarakat memiliki inisiatif untuk mulai menjaga penyu dengan mengurangi pengambilan daging dan telur bahkan Kampung Bremi berkomitmen untuk membuat peraturan kampung. Pada akhir penyuluhan dilakukan pembagian stiker dan pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menjaga penyu belimbing dan habitatnya.***

(Teks dan foto: Kartika Zohar/UNIPA)



LOKAKARYA PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KKP

Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) diidentifikasi sebagai kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati laut sangat tinggi dan menjadi prioritas pengembangan kawasan konservasi laut di Indonesia dan juga di dunia. Di Indonesia dilihat dari sisi siapa pengelolanya kawasan konservasi laut bentuknya dapat beragam. Sebagai contoh Taman Nasional Laut seperti Taman Nasional Teluk Cenderawasih pengelolaannya saat ini adalah Balai Besar Taman Nasional dibawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Raja Ampat pengelolaannya dilakukan Satuan Kerja dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jejaring Taman Pulau Kecil Raja Ampat dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang saat ini dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Contoh jejaring atau kawasan konservasi perairan lain di BLKB yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten adalah di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Tambrauw.

Walaupun lembaga pengelolanya berbeda-beda tetapi tujuan pembentukan kawasan konservasi laut secara umum hampir sama yaitu untuk melindungi kelestarian keanekaragaman hayati sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi tersebut. Wilayah BLKB saat ini memiliki lebih dari 12 kawasan konservasi perairan dengan total luas lebih dari 3,5 juta hektar dan memberikan kontribusi lebih dari 25% luasan kawasan konservasi secara umum di Indonesia saat ini. Di satu sisi jumlah dan luasan kawasan konservasi laut penting untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia membentuk 20 juta hektar kawasan konservasi laut pada tahun 2020. Tetapi disisi lain peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi juga menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Karena efektifitas pengelolaan kawasan konservasi akan memberikan dampak terhadap kelestarian sumberdaya hayati dan juga dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Dari berbagai data saat ini sangat sedikit kawasan konservasi laut di Indonesia yang dikelola secara efektif.

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) bekerjasama dengan program Marine Protected Areas Governance (MPAG) telah mengembangkan sebuah perangkat yang disebut Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K). Pedoman Teknis yang telah diresmikan penggunaannya melalui Surat Keputusan DirJen KP3K No.44/2012 dimandatkan dilakukan setiap tahun pada semua kawasan konservasi laut yang pengelolaannya dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk beberapa kawasan konservasi di BLKB. Pengelolaan sebagian besar kawasan konservasi di BLKB juga mendapat dukungan pendanaan dari Walton Family Foundation yang mensyaratkan evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan setiap tahun dengan menggunakan World Bank Score Card. Sehingga dengan pertimbangan tersebut perlu dilakukan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi laut di BLKB baik dengan perangkat E-KKP3K maupun dengan World Bank Score Card.

Terkait dengan hal tersebut maka Kementerian Kelautan dan Perikanan RI – Direktorat KKJI, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Universitas Papua (UNIPA), Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fund (WWF) dan Starling Resources menggelar Lokakarya Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Bentang Laut Kepala Burung Menggunakan Perangkat E-KKP3K dan World Bank Score Card di Hotel City View Sorong pada tanggal 3 – 5 Juni 2015.

“Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk membekali peserta dengan konsep dasar di balik pengembangan dan penggunaan pedoman teknis E-KKP3K dan World Bank Score Card, memperkenalkan secara rinci pedoman teknis E-KKP3K dan World Bank Score Card serta untuk meningkatkan kemampuan peserta menggunakan pedoman teknis E-KKP3K dan World Bank Score Card untuk menilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di Bentang Laut Kepala Burung, Papua,” papar Ir. M. Saefudin, M.Si, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam pidato pembukaan acara. Dari kegiatan ini juga diharapkan akan melahirkan sebuah dokumen status pengelolaan masing-masing kawasan konservasi di Bentang Laut Kepala Burung pada tahun 2015, baik dengan E-KKP3K atau dengan World Bank Score Card.*** (Teks dan foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)



Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi akan memberikan dampak terhadap kelestarian sumber daya hayati dan juga dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya





(Foto: Arit Rasit/WWF-Indonesia)

Duyungku Sayang, Duyungku Malang

Pagi itu, saya sedang berada dibagan puri milik Udin yang sejak tahun 2013 mencari ikan puri dan ikan pelagis kecil disekitar perairan pulau Yoopmeos. Saya melakukan aktifitas rutin sebagai tenaga lepas pemantau hiu Paus di WWF ID project Taman Nasional Teluk Cenderawasih dibuat kaget oleh nelayan Pulau Yoop yang memberi kabar ada pembantaian duyung. Hanz Ayomi, nelayan Pulau Yoop berkata “Arit, disana ada yang bunuh duyung, ko bisa kesana kah kasih tahu dorang? (Arit disana ada nelayan yang menangkap duyung bisakah kau kesana untuk peringati mereka?)”.

Duyung (dugong) adalah sejenis mamalia laut yang merupakan salah satu anggota Sirenia atau lembu laut yang masih bertahan hidup, duyung masih merupakan kerabat evolusi gajah, yang mencapai Hidup hingga 70 tahun dan merupakan satu-satunya hewan yang mewakili suku Dugongidae, hidup diperairan indo pasifik dengan kondisi perairan yang tenang dengan suhu tertentu, duyung sangat bergantung kepada rumput laut sebagai sumber makanan sehingga penyebarannya terbatas disekitar pantai dimana ia dilahirkan. Duyung menjadi hewan buruan karena daging dan lemaknya, kawasan penyebaran duyung semakin berkurang dan populasinya semakin menghampiri kepunahan. IUCN mengkategorikan dugong dalam kondisi terancam punah, sedangkan CITES melarang perdagangan barang-barang produksi yang dihasilkan oleh hewan ini.

Di Indonesia, duyung juga dilindungi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 (pengaturan tentang pengelolaan tumbuhan dan satwa yang dilindungi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam); dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (perlindungan sistem penyangga/habitat) dan pasal 3, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 68 Tahun 1998 yang mengatur tentang pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, cagar alam dan kawasan suaka margasatwa.

Dengan cepat saya dan Hanz Ayomi menuju lokasi yang disebut sedang terjadi pembantaian dugong. Setibanya disana, duyung sudah mati dan tampak sayatan, bekas tombak atau penikan yang digunakan untuk memburu Duyung sejak malam di perairan Pulau Dua (15 menit dari bagian utara Pulau Yoopmeos).

Saya segera menghampiri nelayan yang diduga memburu Duyung tersebut “Bapa, selamat pagi kapan duyung ini ditangkap? Kenapa bapa harus tangkap duyung? Bapa tahu kalau duyung ini sudah langka dan dilindungi?” dan nelayan itupun menyahut dengan santai “Saya juga tidak tiap hari buru ini duyung, cuma karena saya butuh uang jadi!” (saya tidak setiap hari menangkap duyung ini hanya karena saat ini saya sangat butuh uang). Sayapun mencoba menjelaskan bahwa duyung juga bisa memberikan tambahan penghasilan tanpa harus dibunuh.

Nelayan tersebut kembali menjawab “Ahh torang tidak tau sampe disitu jadi!” (saya tidak mengerti apa yang anda maksud). Mendengar jawaban tersebut saya tersadar bahwa pemahaman dan kegiatan peningkatan ekonomi tanpa merusak alam penting ditingkatkan agar alam kita tetap terus terjaga. Nelayan tersebut memaparkan bahwa daging duyung akan dipotong-potong kemudian dipanggang dengan asap, sebagian dikonsumsi sendiri, dibagi ke tetangga dan dibawa ke Wasior untuk dijual di pasar. Kampung Yoopmeos merupakan salah satu pemukiman pesisir diantara Wasior dan Windesi kabupaten Teluk Wondama.

Karena merupakan pulau kecil, maka umumnya masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan sebagian kaum perempuannya bekerja membuat lading untuk sayuran dan meramu sagu. Hasil tangkapan utama nelayan di Yoopmeos adalah ikan karang, lobster dan cumi, karena dikelilingi Oleh terumbu karang dan ekosistem mangrove. Lamun terhampar luas di perairan Pulau Yoopmeos, membuat duyung gemar mencari makan di perairan Yoopmeos ini. WWF-Indonesia dan Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih telah berupaya mendampingi masyarakat agar aktifitas penangkapannya tidak merusak ekosistem perairan. Namun, masih ada masyarakat yang perlu didampingi secara ekstra untuk akhirnya bersama ikut menjaga ekosistem perairan Pulau Yoopmeos. Semoga dalam beberapa tahun mendatang, seluruh masyarakat Yoopmeos telah beresatu untuk melindungi ekosistem perairan.***

(Teks: Feronika Manohas dan Arit Rasit/WWF-Indonesia)

Pemaparan Hasil Kajian dan Informasi KKLD Abun

Upaya konservasi penyu dan habitatnya di Jamursba Medi dan Warmon telah dilakukan sejak lama khususnya penguatan status kawasan yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor: 820/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 November 1982, tentang Penunjukkan Jamursba Medi menjadi kawasan cagar alam. Penetapan status kawasan cagar alam tersebut kemudian dirubah menjadi kawasan suaka marga satwa melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/kpts-II/1999 dengan luas kawasan 278,25 ha. Namun demikian kawasan suaka marga satwa tersebut hanya sebatas pada status penunjukan saja dan belum ada status penetapannya.

Selanjutnya pada tahun 2005, kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Konsevasi Perairan Daerah (KKPD) Abun berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sorong No. 142 tahun 2005 dengan luas wilayah sekitar 26.972,968. Namun demikian pada tahun 2008, sesuai dengan Undang-undang No. 56 tahun 2008, Kabupaten Tambrauw ditetapkan sebagai kabupaten baru dimana kawasan pantai peneluran penyu di Jamursba Medi dan Warmon masuk di dalam wilayahnya. Sehingga secara otomatis kegiatan pengamanan dan perlindungan habitat penyu dan pengelolaan KKPD Abun tidak lagi menjadi bagian otoritas Kabupaten Sorong. Hal ini berdampak pada tidak adanya kegiatan pengelolaan KKPD Abun.

Bernadus R. Tethool, Project Leader Abun – WWF Indonesia menjelaskan, “sayang sekali jika KKPD Abun tidak mendapat perhatian karena akan berdampak buruk juga pada habitat penyu belimbing di Jamursba Medi dan Warmon dan juga upaya perlindungannya. Sehingga perlu dilakukan pemantapan status kawasan yang nomenklatur dan otoritas pengelolanya sejak awal dilakukan oleh Kabupaten Tambrauw.” WWF Indonesia selama ini telah melakukan serangkaian kegiatan perlindungan dan pemantauan habitat dan populasi penyu belimbing di kawasan pantai Jamursba Medi dan Warmon. Upaya penyadartahuan masyarakat dan kerjasama antar semua pihak juga telah dilakukan. Selain upaya-upaya tersebut, penetapan kawasan pantai Jamursba Media dan Warmon perlu untuk ditetapkan sebagai KKPD Kabupaten Tambrauw.

Bernadus menambahkan, “WWF bekerjasama dengan pemerintah daerah, instansi (SKPD) terkait, universitas, dan masyarakat berusaha untuk mendorong ditetapkannya kawasan Jamursba Medi dan Warmon sebagai KKLD. Kami akan menyampaikan hasil kajian untuk memberikan update informasi kepada para stakeholder terkait khususnya pemerintah daerah. Harapannya supaya penetapannya terrealisasi.” Pemaparan hasil kajian dan informasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2015 di Swiss Bell Hotel – Manokwari. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Tambrauw dalam memperlancar proses pemantapan status kawasan peneluran penyu belimbing terutama dalam menyiapkan dokumen –dokumennya. Lebih lanjut, hal tersebut akan memperjelas status hukum kawasan Jamursba Medi oleh pemerintah pusat (Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup) sehingga akan memudahkan penyusunan rencana aksi kegiatan pemantapan status kawasan sesuai dengan tahapan-tahapan yang dibutuhkan.*** (Teks: WWF-Indonesia)



(Foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)

Mengolah Ikan menjadi Produk Makanan

Koperasi Embun Pagi Raja Ampat Selatan Kabupaten Raja Ampat adalah salah satu kelompok yang tujuan utamanya untuk pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang perikanan dan perkebunan di Misool dan Kofiau. Sebagian besar anggota koperasi adalah ibu-ibu. Kantor koperasi ini terletak di Kampung Limalas, Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat. Namun adanya keterbatasan keterampilan dan pengetahuan tentang pengolahan hasil perikanan menjadi suatu produk perikanan menjadi kendala bagi para anggota koperasi untuk mengembangkan kegiatannya. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan sebuah kegiatan peningkatan kapasitas terhadap anggota koperasi dalam hal pengolahan hasil perikanan serta peningkatan produksi perikanan.

The Nature Conservancy (TNC) di Raja Ampat melalui program *community fisheries* mendukung Koperasi Embun Pagi untuk meningkatkan kapasitas lembaga dan anggotanya termasuk memberikan pelatihan dan memberikan pendampingan untuk menghasilkan produk makanan yang bersumber dari hasil perikanan.

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan belajar ke Kelompok Wanita Nelayan Fatimah Az-Zahra, Kota Makassar dan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Alga'e Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 10 – 13 April 2015 lalu. Beberapa hasil produk perikanan yang telah dipelajari disana adalah: abon ikan, nugget ikan, bakso ikan serta otak-otak. Sepulang dari kegiatan kunjungan belajar, anggota Koperasi Embun Pagi langsung mempraktikkan ilmu yang didapatnya. Tidak hanya berhenti sampai disini, anggota Koperasi Embun Pagi kemudian dilatih tentang manajemen koperasi termasuk pengelolaan keuangan.

Saat ini produk abon ikan tenggiri produksi Koperasi Embun Pagi sedang bersiap dibawa ke Departemen Kesehatan untuk mendapatkan uji laboratorium terkait higienitas produk, yang kemudian akan berlanjut untuk memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah semua tahapan tersebut dilalui, maka produk makanan tersebut siap dipasarkan ke masyarakat luas.

Ke depan, TNC bersama Dinas Koperasi Kabupaten Raja Ampat dan BLUD UPTD KKP Raja Ampat, juga akan membantu mendampingi pemasaran produk-produk makanan berbahan utama ikan ini. "Harapannya koperasi ini nantinya merupakan titik awal pemberdayaan masyarakat yang ada di Misool dan Kofiau, yang kemudian berkembang menjadi tempat kegiatan produksi dan pengolahan hasil-hasil perikanan secara berkelanjutan," jelas Lukas Rumetna, Papua Bird's Head Portfolio Manager The Nature Conservancy.***



Anjelina dan Rahel, dua orang anggota Koperasi Embun Pagi menunjukkan produk koperasi berupa abon ikan tenggiri dan minyak kelapa.

Pegiat Lingkungan Bersihkan Pantai Dofior di Kota Sorong



Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Segitiga Terumbu Karang, pada Sabtu sore (13/6) pegiat lingkungan hidup di Kota Sorong yang terdiri dari Forum Jurnalis Lingkungan, The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI), Bank Sampah bersama pemangku kepentingan Kelurahan Kampung Baru dan masyarakat menggelar kegiatan membersihkan sampah di sekitar Pantai Dofior, Kota Sorong. Setelah usai membersihkan sampah di sekitar Pantai Dofior, kegiatan dilanjutkan dengan mengajak warga menuliskan pesan untuk menjaga laut agar selalu lestari.

(Teks dan foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)

Melindungi dan Melestarikan Penyu di Papua

Secara alami keberlanjutan populasi penyu di alam dibatasi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketersediaan makanan, keamanan habitat peneluran, dan suhu. Perburuan dan pencemaran lingkungan juga telah menjadi ancaman besar yang disebabkan oleh manusia. Diketahui bahwa akhir-akhir ini faktor-faktor utama dimaksud sudah sangat banyak terganggu, bahkan dalam beberapa kasus ada pantai peneluran yang hilang karena pembangunan, pembukaan lahan pertanian, abrasi dan lain-lain.

Hal paling kritis telah terjadi adalah punahnya populasi penyu di tempat-tempat tertentu akibat perburuan daging dan telur penyu secara berlebihan. Karena itu Yayasan Penyu Papua (YPP) berupaya mencegah kerusakan habitat terutama akibat dari aktivitas manusia yang berdampak terhadap kelestarian penyu di alam dengan menciptakan sistem pelestarian yang partisipatif dan berkelanjutan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan YPP adalah memproteksi salah satu pantai peneluran yang potensial di Raja Ampat yaitu Pulau Piai. Walau demikian bukan berarti populasi penyu di Pulau Piai benar-benar terlindungi dari perburuan, hal ini dikarenakan ketika di laut penyu tidak terkonsentrasi pada suatu tempat tertentu melainkan menyebar ke berbagai ekosistem di sekitar pulau-pulau yang ada di Raja Ampat bahkan sampai di luar Raja Ampat, sehingga masyarakat dengan mudah dapat menangkap penyu-penyu tersebut.

Pulau Piai dan Pulau Sayang di Kabupaten Raja Ampat adalah program percontohan kawasan konservasi penyu yang telah dilakukan oleh YPP. Atas persetujuan masyarakat Kampung Selpele dan Salio selaku pemilik tempat, maka sejak tahun 2006 Yayasan Penyu Papua telah memulai program konservasi penyu di Pulau Sayang dan Piai. Walau demikian seluruh aktivitas pengawasan baru berjalan maksimal di tahun 2007. Beberapa program utama yang dilakukan di Pulau Sayang dan Piai adalah patroli laut untuk pengamanan kawasan, memberikan pendidikan konservasi penyu kepada awak kapal, nelayan serta masyarakat yang datang berkunjung ke Pulau Piai, melakukan pemantauan intensif untuk pendataan aktivitas penyu dan kondisi pantai peneluran, studi sukses penetasan sarang (telur), evaluasi pemangsa sarang, penandaan penyu (*tagging*), relokasi sarang yang terancam, dan juga penelitian-penelitian lain bersama peneliti dari Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari. Tim monitoring yang bertugas melakukan pengawasan dan pendataan penyu adalah masyarakat dari Kampung Selpele dan Salio.

Tahun 2006-2008, adalah masa dimana kegiatan penyadaran masyarakat dilakukan cukup intens dan difokuskan kepada kampung-kampung yang biasa mengkonsumsi penyu di Raja Ampat. Pertemuan dilakukan dalam bentuk diskusi-diskusi kelompok kecil, penyebaran brosur tentang konservasi penyu, stiker dan sosialisasi undang-undang konservasi penyu. Khusus di Raja Ampat, sebagian besar pantai peneluran penyu sudah masuk dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Karena itu sejak tahun 2008 program peningkatan pemahaman telah menjadi satu paket pendidikan konservasi secara umum yang dilakukan oleh para mitra di lokasi kerja masing-masing.*** (Teks dan Foto: Yayasan Penyu Papua)



Secara alami keberlanjutan populasi penyu di alam dibatasi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketersediaan habitat pakan, keamanan habitat peneluran, dan suhu.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti Meluncurkan *Cirrhilabrus Marinda*

Ditemukan pertama kali di Ayau, Raja Ampat pada bulan Oktober 2014 pada saat Mark Erdmann PhD dan Gerry Allen PhD sedang mengunjungi Raja Ampat dengan kapal *True North*. Ikan yang cantik ini difoto dan dibandingkan dengan spesies *Cirrhilabrus condei* yang memiliki kemiripan. Sirip punggung ikan *Cirrhilabrus condei* lebih merah dan kurang tinggi dibandingkan ikan dari Ayau ini. Setelah dipelajari foto-foto ikan dari Ayau dan foto-foto *Cirrhilabrus condei* dari Papua New Guinea, akhirnya kedua peneliti ini sadar bahwa ikan ini memang merupakan spesies baru.

Mark Erdmann dan Gerry Allen langsung memutuskan untuk memberikan nama ikan ini kepada Bupati Raja Ampat Marcus Wanma dan Wakil Bupati Inda Arfan (disingkat Marinda) sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap masyarakat dan alam Raja Ampat selama masa jabatan mereka. Sebagai pimpinan pertama di Kabupaten Raja Ampat, Marinda telah membawa nama kabupaten yang dulunya hanya diketahui di Papua tetapi sekarang sudah dikenal luas di dunia bahkan sudah menjadi primadona di *Coral Triangle*.

Secara resmi ikan ini dinamakan *Cirrhilabrus marinda* pada acara perayaan HUT Raja Ampat yang ke-12, tanggal 9 Mei 2015 lalu. Penyerahan piagam penamaan ikan *Cirrhilabrus marinda* secara simbolis diserahkan oleh Ketut Sarjana Putra, Vice President Conservation International Indonesia kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Ibu Susi Pudjiastuti, untuk kemudian diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat. Dalam sambutannya, Ibu Susi menyampaikan, "Penghargaan ini memiliki konsekuensi dimana Marinda harus tetap mengawasi kebijakan Pemda Raja Ampat ke depan, meskipun tidak lagi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati".

Cirrhilabrus marinda merupakan jenis ikan yang ke-1558 yang ditemukan di perairan Raja Ampat dan jenis ikan yang ke-1753 yang ditemukan di Bentang Laut Kepala Burung di Papua Barat. Angka ini dinyatakan sangat luar biasa oleh para peneliti serta pecinta laut, dan mengukuhkan posisi Raja Ampat sebagai daerah dengan keanekaragaman hayati ikan karang yang paling tinggi di dunia!

*** (Wida Sulistyningrum/Conservation International)



Penyerahan piagam penamaan ikan *Cirrhilabrus marinda* secara simbolis oleh Ketut Sarjana Putra, Vice President Conservation International Indonesia kepada Ibu Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia untuk kemudian diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat. (Foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)

Newsletter ini diterbitkan oleh Sekretariat Bentang Laut Kepala Burung
Jl. Transito no. 56, Wosi, Manokwari 98312, Papua Barat.

Kontak:

- Henny Widayanti, E-mail: hwidayanti@conservation.org
- Nugroho Arif Prabowo, E-mail: nprabowo@tnc.org
- Wida Sulistyningrum, E-mail: wsulistyningrum@conservation.org
- Feronika Manohas, E-mail: fmanohas@wwf.or.id

www.birdsheadseascape.com



BENTANG LAUT KEPALA BURUNG, PAPUA